

Tim Tanggap Cepat Berbasis Hak: Menentang Pelanggaran Negara dan Melindungi Mata Pencaharian Kaum Miskin Perkotaan

Ringkasan Eksekutif

Sejak Agustus 2021, Poros Penelitian Urbanisme Informal (Informal Urbanism/InfUr-) Universitas Melbourne, Aliansi Selamatkan San Roque (Save San Roque/SSR), dan Aliansi Pedagang Metro Manila (Metro Manila Vendors' Alliance/MMVA) telah melaksanakan proyek advokasi dan penelitian yang diberi nama "Ruang Sipil, Mata Pencaharian, dan Pemulihan Pascapandemi di Manila." Proyek ini menekankan hubungan mendasar antara ruang sipil dan mata pencaharian selama pandemi COVID-19. Proyek ini juga berusaha untuk memperkuat dan memperluas kemitraan organisasi akar rumput dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan sekutu pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap kaum miskin perkotaan yang mengambil bagian dalam mata pencaharian yang sah dan menolak pengusuran paksa di Metro Manila, Filipina selama pandemi. Segi utama dari pelaksanaan proyek ini adalah pembentukan Tim Tanggap Cepat (Quick Response Team/QRT) untuk mendokumentasikan dan menangani pengusiran politik, operasi pembersihan terhadap pekerja sektor informal, dan pengusuran unit perumahan tidak resmi. Tim ini terdiri dari para pemimpin akar rumput, perwakilan organisasi non-pemerintah (NGO), dan pejabat pemerintah yang mengawal hak-hak dasar kaum miskin perkotaan.

Halaman-halaman berikutnya menjelaskan aspek-aspek pokok dari pelaksanaan proyek ini, dengan penekanan pada QRT sebagai fokus dari studi kasus:

- Konteks ekonomi dan sosial-politik yang lebih luas di lokasi proyek,
- Tujuan utama proyek,
- Pembentukan QRT; komposisi, kegiatan, dan perolehan awal,
- Beberapa kutipan dari kaum miskin perkotaan dan pekerja informal, dan
- Langkah-langkah selanjutnya dan rencana masa depan.

Deskripsi Proyek – Konteks yang Lebih Luas

Pandemi COVID-19 telah memperburuk dan berkontribusi pada ketimpangan sosio-ekonomi yang semakin dalam. Penegakan kebijakan penguncian wilayah (*lockdown*), pembatasan gerak, dan tindakan pengendalian COVID-19 lainnya telah berdampak buruk bagi 1,6 miliar pekerja informal di seluruh dunia¹. Ini merupakan jumlah yang mengejutkan. Di Metro Manila, sebagian besar penduduk miskin perkotaan tinggal di permukiman liar, mencari nafkah dari kegiatan upahan harian yang tidak tentu seperti pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, dan operasi angkutan tidak resmi. Penutupan wilayah (*shutdown*) COVID-19 telah merampas nafkah kelompok masyarakat ini sambil mengurung mereka dalam keadaan hidup yang tidak memungkinkan mereka menjaga jarak. Melampaui krisis kesehatan yang mendasar, pandemi COVID-19 telah menjelma menjadi tantangan-tantangan akut yang terkait dengan kerawanan pangan dan mata pencaharian, serta menciutnya ruang untuk menegaskan hak-hak sipil dan politik.

Di Filipina, pemerintah telah mbingkai pandemi sebagai masalah keamanan daripada masalah kesehatan masyarakat, merujuk pada pemolisian berkekerasan terhadap kaum miskin perkotaan. Pada

¹ International Labour Organisation. (2020). COVID-19 crisis and the informal economy: Immediate responses and policy challenges. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf

awal April 2020, 21 penduduk San Roque ditahan karena menyuarakan ketidakpuasan dan mencari bantuan untuk mengatasi kelaparan mereka sendiri. San Roque merupakan sebuah permukiman miskin perkotaan dengan sekitar 30.000 penduduk, dan tempat proyek ini dilaksanakan. Dalam bulan yang sama, 19 pedagang kaki lima anggota MMVA keluar dan menjual sayuran untuk mengurangi rasa lapar. Mereka pun dipenjarakan karena melanggar pembatasan penguncian wilayah. Peristiwa pejabat lokal memenjarakan pelanggar karantina dalam kandang anjing dan peti mati telah muncul di banyak desa. Pendekatan yang kasar ini terjadi dalam lingkungan politik yang lebih luas yang dikenal sebagai “Dutertismo,” yang mengandung makna penerapan kekuatan koersif negara oleh Presiden Rodrigo Duterte untuk mengintimidasi mereka yang berbeda pendapat, mengkritik, dan tidak mau menurut. Di San Roque, polisi berseragam mengintimidasi kelompok sukarelawan dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam intervensi krisis COVID-19.

Tujuan

Dampak buruk dari pandemi dan langkah-langkah pemerintah tersebut mendorong Pusat Penelitian InfUr Universitas Melbourne, SSR, dan MMVA untuk melaksanakan proyek advokasi dan penelitian yang diberi nama “Ruang Sipil, Mata Pencaharian, dan Pemulihan Pascapandemi di Manila.” Proyek ini berupaya untuk memperkuat hubungan mendasar antara ruang sipil dan mata pencaharian masyarakat miskin perkotaan. Proyek ini diawali pada Agustus 2021 dan kini telah mulai melakukan kegiatan advokasi, dokumentasi, dan pelatihan yang melibatkan warga miskin perkotaan, pedagang kaki lima, pekerja angkutan informal, kelompok-kelompok warga, dan instansi pemerintah.

Aspek pokok dari pelaksanaan proyek ini adalah pembentukan Tim Tanggap Cepat (QRT) terhadap pengusiran politik dan penggusuran paksa. Tim ini terdiri dari tokoh-tokoh kaum miskin perkotaan, perwakilan organisasi non-pemerintah (NGO), dan pejabat-pejabat pemerintah dari lembaga berikut: Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights/CHR), Komisi Presiden untuk Kaum Miskin Perkotaan (Presidential Commission for the Urban Poor/PCUP), MMVA, SSR, Koalisi Kariton, CharisMaria, dan Urban Forum. QRT memiliki tiga peran penting dalam pelaksanaan proyek:

1. Memperkenalkan para pemimpin kaum miskin perkotaan dengan instansi pemerintah dan pendukung kebebasan sipil yang dapat mencegah penggusuran skala besar, penggusuran paksa tersasar, perlakuan buruk, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap para pemimpin akar rumput yang memprotes pembatasan hak asasi manusia;
2. Memberikan nasihat politik dan hukum praktis mengenai pembongkaran ilegal, pemerosotan standar kehidupan secara sengaja (misalnya pemagaran, pemutusan layanan umum dasar seperti air dan listrik, dll.), dan militerisasi dan penyalahgunaan kewenangan negara terhadap penduduk permukiman tidak resmi dan pekerja informal;
3. Mengambil bagian dalam serangkaian dialog untuk mengidentifikasi usulan kebijakan konkret untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya kaum miskin perkotaan.

Bagaimana Tindakan Kami Membantu Melindungi Ruang Sipil (dan Mata Pencaharian) dan Hasil Kegiatan

Sebelum memaparkan beberapa hasil kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini, penting untuk dicatat bahwa tim tanggap cepat internal, baik di SSR maupun MMVA, masing-masing telah membantu memfasilitasi pembebasan pedagang dan penduduk San Roque yang ditahan pada April 2020. Seperti



disebutkan di atas, aparat negara telah menangkap 21 warga San Roque dan 19 pedagang anggota MMVA pada kesempatan berbeda, merujuk pada aturan penguncian wilayah COVID-19 sebagai dasar hukum. SSR membantu membentuk sebuah tim praktisi hukum dan menggalang dana untuk menanggulangi penahanan warga yang ditangkap. Dari sisinya, MMVA menghubungi pengacara aktivis dan berkoordinasi dengan Walikota Quezon City untuk memfasilitasi dikeluarkannya anggota-anggota mereka. Pembentukan QRT multi-sektor untuk proyek ini dibangun di atas dan melanjutkan pencapaian awal ini.

Operasi Pembersihan Jalanan

Antara Agustus dan Oktober 2021, 25 unit becak dan 12 *kariton* (gerobak kecil yang biasa digunakan untuk mengangkut barang-barang kerja, lihat Gambar 2) disita oleh Otoritas Pengembangan Metropolitan Manila (Metropolitan Manila Development Authority/MMDA), tanpa menyebutkan dengan jelas apa pelanggarannya. Untuk mengatasi rangkaian operasi pembersihan paksa dan sewenang-wenang ini, QRT menulis surat terbuka kepada MMDA. QRT juga meluncurkan kampanye media dan informasi daring tentang dampak operasi pembersihan MMDA terhadap pengemudi becak dan pemilik kariton di Quezon City. Setelah lebih dari seminggu, Tim tersebut mengirimkan lagi sebuah surat resmi kepada MMDA (dengan tembusan kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Presiden untuk Kaum Miskin Perkotaan), menuntut adanya dialog antara MMDA dan pemilik becak/kariton untuk membahas hal-hal berikut:

1. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga yang dirugikan guna dengan mudah mengambil kembali becak dan kariton yang disita;
2. Praktik-praktik yang dapat dilakukan oleh warga yang dirugikan dan asosiasi mereka untuk mencegah penyitaan becak dan kariton secara paksa dan sewenang-wenang berikutnya;
3. Langkah konkret dan kesepakatan antara MMDA dan pengemudi becak untuk mengizinkan para pengemudi menggunakan ruas jalan tertentu sebagai tempat kerja (misalnya terminal untuk mengambil dan menurunkan penumpang), terutama selama masa pandemi ini.

Capaian

Sebuah dialog dilangsungkan pada tanggal 4 November 2021. QRT diwakili oleh pengacara advokasi dan HAM publik, seorang sukarelawan dari SSR, dan dua pemimpin pengemudi becak. Pertemuan tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan pokok yang mengarah pada hal-hal berikut:

- Dikembalikannya dua unit becak milik pimpinan yang ikut berdialog (lihat Gambar 1 halaman 5);
- Klarifikasi mengenai proses hukum cara pengambilan kembali becak dan kariton yang disita;
- Moratorium operasi pembersihan sampai dengan akhir Desember 2021;
- Dorongan dari MMDA bagi para pengemudi becak untuk membuat sistem pemeliharaan terminal angkutan informal;
- Persetujuan dari perwakilan MMDA untuk menyambut dan bekerja sama dengan kemungkinan adanya pengusutan oleh CHR atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pegawai MMDA selama operasi pembersihan yang dilakukan dengan kekerasan;

Untuk membantu mengokohkan barisan pengemudi becak dan pemilik kariton, QRT sepakat untuk melakukan serangkaian pelatihan dan pendidikan HAM dengan para pekerja informal tersebut bekerja sama dengan Komisi Hak Asasi Manusia.

Rendahnya Tingkat Vaksinasi COVID-19 di Kalangan Masyarakat Miskin Perkotaan

Amat penting untuk mengatasi masalah ini karena vaksin COVID-19 telah menjadi 'tiket' demi mendapatkan persetujuan pemerintah daerah untuk mengambil bagian dalam kegiatan mencari nafkah. Ini karena birokrat lapangan akan memeriksa 'sertifikat vaksin' para pedagang informal sebelum bisa membiarkan mereka kembali ke jalanan. MMVA berkoordinasi dengan Kantor Walikota Quezon City untuk memfasilitasi 'jalur vaksin' terpisah untuk para pedagang.

Capaian

Prakarsa ini berhasil menginokulasi sekitar 2.000 pedagang kaki lima dan penduduk miskin perkotaan. Kegiatan vaksinasi dimungkinkan karena hubungan yang sudah berlangsung sejak lama antara MMVA dengan walikota Quezon City. Kemitraan ini juga berperan dalam pembebasan 19 pedagang anggota MMVA yang ditangkap polisi tahun sebelumnya. Koordinator MMVA Ibu Flora Santos menghubungi Walikota Quezon City Joy Belmonte yang kemudian membantu pembebasan segera para pedagang kaki lima yang ditahan.

Selain kegiatan vaksinasi, sumber daya dari proyek ini juga membantu MMVA bertawar-menawar untuk diterbitkannya Perjanjian Moratorium Hari Raya Pedagang (Hawkers' Holiday Moratorium Agreement) oleh pemerintah Quezon City (lihat Gambar 3 di halaman 6). "Moratorium Natal" ini merupakan kesepakatan tahunan yang memastikan tidak akan ada operasi pembersihan pedagang kaki lima antara 5 November 2021 hingga 15 Januari 2022. Moratorium tersebut berpedoman pada aturan berikut:

1. Pengesahan kegiatan perdagangan oleh *Barangay* (pemerintah tingkat desa) yang bersangkutan,
2. Kepatuhan ketat terhadap Pedoman Protokol Kesehatan dan Keselamatan (Health and Safety Protocol Guidelines) sesuai kategori Waspada (Alert) Tingkat 4,
3. Sama sekali tidak ada 'iktikad baik' (pungutan liar) dalam jumlah berapa pun yang akan dikutip dari pedagang oleh otoritas pemerintah,
4. Pemerintah Kota hanya akan memungut pembayaran pajak dan biaya yang diperlukan,
5. Penggunaan warung, tenda, atau gerobak sementara,
6. Terpeliharanya kebersihan dan ketertiban serta sanitasi lapak oleh para pedagang/kelompok atau perkumpulan pedagang,
7. Pembongkaran perlengkapan berdagang secara sukarela pada akhir periode moratorium.

Ancaman Pengusiran terhadap Penduduk Permukiman Tidak Resmi di San Roque

SSR telah membantu kelompok-kelompok masyarakat di daerah San Roque dalam rangkaian dialog dengan pemerintah Quezon City tentang Rencana Pengembangan Masyarakat (Community Development Plan/CDP) yang mereka usulkan. Rencananya adalah strategi pembangunan kembali di lokasi (*on-site*) yang akan memberikan keamanan bagi para penyewa dan unit perumahan yang terjangkau untuk pemukim liar di Quezon City. Dialog resmi tersebut diikuti dengan aksi protes untuk menarik perhatian publik pada masalah mereka yang telah berlangsung puluhan tahun dan untuk menekankan pentingnya ruang sipil dan aksi politik kolektif dalam proyek kampanye mereka untuk mendukung perumahan bagi orang miskin.

Capaian

Strategi gabungan dialog dan aksi protes sejauh ini telah efektif. Pemerintah Quezon City telah

berkomitmen untuk memadukan usulan CDP San Roque ke dalam proyek perumahan Kota di bawah program pembangunan kembali 'di lokasi' (*on-site*) atau relokasi 'dalam kota' (*in city*).

Situs web QRT

Untuk memastikan bahwa hasil keluaran (*output*) utama dari proyek ini dapat disampaikan secara umum, QRT telah mendirikan situs web yang berfungsi sebagai wadah daring semua kegiatan relevan yang dilakukan oleh para anggota QRT. Situs web ini juga memuat kisah pekerja informal miskin perkotaan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi hidup dan kerja mereka. Situs web ini masih terus dikerjakan dan dapat dilihat di sini: tinigmaralita.com. Dalam bahasa Filipina, "*tinig maralita*" berarti "suara orang miskin." Lebih banyak video, foto, dan dokumen akan ditambahkan ke situs tersebut dalam minggu-minggu mendatang.

Kutipan dan Visual

Sebuah pernyataan dari seorang perempuan dan orang tua tunggal yang telah menjadi pengemudi becak selama enam tahun:

"Bakit ganun sila manghuli? Talagang paalisin ka sa inuupuan mo para makuha yung pedicab. Hindi naman yun makatao. ... Nakiusap ako, umiyak na ako kasi may sakit ang anak ko nung time na yun nang huli. Hanggang ngayon lalo silang tumitingkad ng huli kasi sa tingin nila parang walang magagawa yung mga taong nahuhulihan. Kaya kaya nilang harasin, ipamalibag nila pag ayaw pumayag ng mga tao... Halos araw-araw na po sila nanghuhuli... Sabi nga ng mga ibang pedicab drivers, kahit anong pakiusap naming wag kaming hulihin kasi naghahanap-buhay naman kami ng marangal. Hindi naman kami nagnanakaw."



Gambar 1: Seorang pengemudi mengambil kembali becaknya setelah pelaksanaan dialog dengan MMDA



Gambar 2: Kariton, alat yang biasa dipakai untuk mencari nafkah di jalanan

(Mengapa mereka [pegawai MMDA] membersihkan seperti itu? Mereka menggeret paksa Anda ketika sedang duduk di becak. Itu tidak manusiawi. ... Saya memohon; saya bahkan menangis karena anak saya sedang sakit saat itu. Mereka semakin kasar karena menganggap orang yang ditangkap tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka bisa melecehkan begitu saja ... Jangan tangkap kami karena kami mencari kehidupan yang bermartabat. Kami tidak mencuri.)

Kutipan dari seorang tokoh pedagang:

“Hindi kami umaasa sa gobyerno; nagsisikap kami para magkaroon ng maayos na buhay. Pwesto lang kailangan namin, mahirap ba ibigay? Kahit mahirap kami, kung patuloy na lumalaban at sama samang kumilos makakamit ang aming mga hangarin na maayos na pamumuhay.”

(Kami tidak bergantung pada pemerintah; kami berusaha untuk memiliki kehidupan yang baik. Kami hanya butuh lapak, sulitkah [pemerintah] memberikannya? Meskipun kami miskin, jika kami terus berjuang bersama, kami dapat mencapai mimpi akan hidup yang baik.)



Gambar 3: MMVA bertemu dengan walikota Quezon City dalam rangka penerbitan moratorium hari raya Natal untuk pedagang

Langkah Selanjutnya/Rencana Masa Depan

Dalam beberapa minggu ke depan, kegiatan-kegiatan berikut akan dilakukan untuk mempertahankan capaian dari pelaksanaan proyek:

1. Mengadakan rapat-rapat QRT untuk mengidentifikasi strategi pemulihan pascapandemi yang berpusat pada pentingnya ruang sipil serta kerentanan dan peluang yang tidak setara kaum miskin perkotaan. Agenda pemulihan pro-kaum miskin juga akan disampaikan kepada calon-calon lokal dan nasional untuk pemilu 2022 di dalam negeri, menjadikannya isu utama pemilu;
2. Memfasilitasi dialog antara pengemudi becak dan pejabat Barangay untuk membuat pedoman yang jelas untuk: a) mencegah perampasan becak dan kariton secara sewenang-wenang dan dengan kekerasan; b) mengambil kembali unit angkutan yang disita; dan c) menyusun rencana pendirian terminal becak;
3. Melakukan serangkaian pertemuan dan pendidikan HAM dengan para tukang becak di San Roque. Ini akan dilakukan bermitra dengan Komisi Hak Asasi Manusia;
4. Memantau pelaksanaan “Moratorium Natal” dan menindak lanjuti segala kemungkinan pelanggaran berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Quezon City setelah serangkaian konsultasi dengan MMVA;
5. Menanggapi semakin terlihatnya polisi/militer di San Roque, yang juga menjadi perhatian utama warga, terutama mereka yang tergabung dalam organisasi yang sebelumnya telah ‘ditandai merah’ (dicap sebagai bagian dari kelompok bersenjata Komunis di Filipina). Dalam beberapa kasus, aparat berseragam melakukan program pemberian makan, mendirikan dapur umum, dan meluncurkan proyek mata pencaharian yang menargetkan anggota perkumpulan masyarakat progresif di daerah tersebut. Ada juga peristiwa aparat berseragam hadir selama beberapa konsultasi dan lokakarya masyarakat, mengintimidasi warga yang menghadiri beberapa kegiatan yang diprakarsai sebagai bagian dari proyek ini. QRT telah setuju untuk mendokumentasikan praktik-praktik ini dan menjajaki kemungkinan tindakan dalam beberapa minggu mendatang;
6. Mencermati pelajaran yang ditarik dari kolaborasi antara jaringan akar rumput dan instansi pemerintah, bagaimana hal itu dilakukan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi apa dapat berhasil dalam konteks pascapandemi, dan apa yang mungkin menghalangi kemampuannya untuk berkembang.